

**POWER
DOESN'T
CORRUPT
PEOPLE,
PEOPLE
CORRUPT
POWER.**

William Gaddis

Komite Akreditasi Nasional, melakukan Launching Skema Akreditasi Sistem Manajemen Anti Penyusapan



2015 dan ISO/IEC TS 17021-9. Dengan adanya skema ini, lembaga sertifikasi sistem manajemen anti penyusapan diharapkan akan segera terakreditasi KAN untuk memberikan sertifikasi kepada organisasi yang akan menerapkan SNI ISO 37001.

Dalam acara tersebut, Teten Masduki mengapresiasi kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Indeks persepsi korupsi dari tahun ke tahun terus membaik. Dari angka 36 pada 2015 menjadi 37 pada

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Salah satu tindakan pemerintah menghadapi masalah tersebut adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Menindaklanjuti Inpres tersebut, BSN mengadopsi secara identik standar ISO 37001: 2016 menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Suap. SNI ISO 37001:2016 dapat digunakan untuk menumbuhkan budaya anti-suap dalam sebuah organisasi/institusi negara maupun swasta.

SNI ISO 37001:2016 membantu organisasi mengendalikan praktek penyusapan dengan menyediakan sejumlah langkah penting diantaranya penetapan kebijakan anti-penyusapan, penunjukan petugas yang berkewenangan untuk mengawasi kepatuhan terhadap praktik anti-penyusapan, pembinaan dan pelatihan anggota organisasi, penerapan manajemen resiko pada proyek dan kegiatan organisasi, pengendalian finansial dan komersial, dan pelembagaan laporan prosedur investigasi. Dalam penerapan manajemen anti-suap, kepemimpinan dan masukan dari manajemen puncak adalah kewajiban. Manajemen puncak dianjurkan aktif mencari dan mempertimbangkan rekomendasi berbagai inisiatif anti-penyusapan yang mempromosikan atau mempublikasikan praktik anti-penyusapan.

Bertepatan dengan peringatan Hari Akreditasi Dunia, BSN dan KAN telah meluncurkan skema akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen anti penyusapan sebagai acuan lembaga sertifikasi di Indonesia yang memberikan layanan sertifikasi sistem manajemen anti penyusapan berdasarkan ISO 37001: 2016, dengan memenuhi persyaratan ISO/IEC 17021-1:

2016. Pertumbuhan memang tidak terlalu progresif tetapi trennya terus membaik. "Saya kira kita harus apresiasi terhadap jajaran pejabat kita, pemerintahan, termasuk kalangan swasta," tandas Teten.

Hanya saja menurut Teten, dalam soal korupsi masih ada area yang selama ini belum tersentuh, yakni korupsi di sektor swasta, padahal dalam konvensi anti korupsi, suap menyusap di sektor swasta juga menjadi bagian dari korupsi. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada korupsi di sektor publik.

Dicontohkan, bagaimana sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang energi, Enron memanipulasi nilai aset sehingga masyarakat tidak tahu dan belakangan perusahaannya ambruk yang berdampak pada ekonomi nasional dan dunia. Kemudian pada 1998, pengelolaan industri perbankan nasional yang kurang transparan berdampak pada pada kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan dan mengguncang ekonomi nasional.

Dua contoh tersebut memperlihatkan praktik suap menyusap dan perilaku koruptif di sektor swasta bisa menghasilkan daya rusak yang besar. Kang Teten lantas memberi gambaran bagaimana porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 2.080 triliun, sebenarnya hanya sekitar 16 persen dari jumlah uang beredar. "Kalau kita hanya memelototi yang 2.080 triliun ini dampaknya *nggak* begitu besar. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang korupsi. Maka yang paling penting juga di sektor swasta," tandas Kang Teten.

Oleh karena itu penerapan SNI, ISO 37001, merupakan aksi prioritas Presiden sebagaimana tertuang dalam Inpres No.10 tahun 2016 yang dikawal oleh Kantor Staf Presiden (dari berbagai sumber).

JULI 2017

Launching SMAP	1
Sertifikasi Anti Korupsi	2
SNI ISO 17024 : 2012	3

Tindak Lanjut Aksi Inisiasi Upaya Sertifikasi Anti Korupsi



FGD Tindak Lanjut Upaya Sertifikasi Anti Korupsi di BSN

Untuk memberikan gambaran tindak lanjut aksi inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi sebagai implementasi Inpres No.10 Tahun 2016 yang telah dicapai oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), BSN mengadakan *Focus Group Discussion* dengan Kantor Staf Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta kementerian dan stakeholder terkait pada Kamis, 15 Juni 2017. Ukuran keberhasilan implementasi Inpres No.10 Tahun 2016 adalah naiknya corruption perception index (cpi) kita,” ujar Deputy Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN, Kukuh S Ahmad saat membuka FGD.

“Ada dua ukuran keberhasilan inisiasi tersebut. yaitu tersusunnya kajian mengenai draft ISO 37001 dan ikut sertanya BSN ke dalam komite ISO,” ujar Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN, Donny Purnomo. Kajian draft telah dilakukan oleh Komite Teknis Perumusan Standar 03-02 – Sistem Manajemen Mutu dengan mengundang perwakilan dari Instansi terkait sebagaimana dinyatakan dalam aksi ke-20 dari Inpres No. 10 tahun 2016. Pada akhirnya, SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan ditetapkan sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui Keputusan Kepala BSN.

ISO 37001: 2016 disusun oleh ISO *Project Committee (PC) 278 – Anti Bribery Management System* yang dibentuk oleh ISO *Technical Committee (TC) 309 - Governance of Organization* pada bulan April 2014. Adapun BSN pada tahun 2016 telah menjadi Participating Member dari TC 309 sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dan berperan dalam pengambilan

keputusan dalam penyusunan Draft of International Standards dalam ruang lingkup TC 309. BSN juga telah melakukan benchmarking proses adopsi ISO 37001 di negara lain dan benchmarking proses pengembangan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi ISO 37001 di negara lain.

Berkaitan dengan komunikasi yang telah dilakukan oleh BSN dan KAN dengan partner-partner dari negara lain, pada bulan maret 2017 sampai Juni 2017 BSN dan KAN menetapkan rencana pengembangan skema akreditasi dan sertifikasi. Sehingga, pada 8 Juni 2017, BSN melaunching skema akreditasi dan sertifikasi SNI ISO 37001:2016.

“Makna launching adalah pemerintah sudah siap dengan perangkat yang diperlukan ketika ada lembaga sertifikasi yang memiliki komitmen untuk memberikan layanan sertifikasi SNI ISO 37001:2016,” jelas Donny.

Dalam kesempatan ini, Donny juga memaparkan rencana tindak lanjut selama tahun 2017 yang telah disusun BSN dalam rangka penerapan SNI ISO 37001:2016. “Salah satu langkah kami adalah mengidentifikasi organisasi penerap potensial,” ujarnya. Ditargetkan, pada awal Juli BSN sudah menentukan lembaga sertifikasi dan organisasi penerap yang akan dijadikan pilot project. Kemudian, di bulan Juli hingga agustus 2017, BSN akan melaksanakan piloting bimbingan

Pengembangan Lingkup Lembaga Sertifikasi, paralel dengan piloting bimbingan organisasi penerap.

Terkait launching skema akreditasi dan sertifikasi SNI ISO 37001:2016, Abraham dari Kantor Staf Presiden memaparkan bahwa animo masyarakat terhadap SNI ISO 37001:2016 cukup positif. Antusiasme ini bukan hanya dari masyarakat, tapi juga dari kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, Abraham meminta agar BSN khususnya serta lembaga pemerintah pada umumnya dapat meningkatkan strategi komunikasi kepada masyarakat. Abraham juga memaparkan bahwa BSN dan kementerian-kementerian terkait perlu menentukan aksi anti korupsi di tahun 2018.

Andy Purwana, Group Head Direktorat Gratifikasi KPK menyatakan bahwa KPK masih akan support terhadap isu SNI ISO 37001:2016. “Deputi pencegahan pun sampai saat ini masih *concern*, dan ingin agar isu ini dipadukan dengan program KPK yang profit, kepada sektor swasta,” ujarnya. Dalam kesempatan ini, Andi berpesan agar BSN dapat memperjelas panduan untuk sektor public dan sektor private dalam kajian SNI ISO 37001:2016.

Adnan Pandu Praja, praktisi hukum yang tergabung dalam Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memaparkan skor dan peringkat CPI Indonesia sejak tahun 2012 hingga 2016. Terlihat bahwa pada tahun



FGD Tindak Lanjut Upaya Sertifikasi Anti Korupsi di BSN

2016, kendatipun skor CPI Indonesia naik 1 poin, namun peringkat Indonesia turun 2 peringkat. Pandu pun mengusulkan agar BSN melakukan MoU dengan KPK, KOMPOLNAS, KNKG, dan MenPan RB, sehingga pola kerja penerapan Inpres No. 10 Tahun 2016 akan terintegrasi dengan baik. Di akhir paparannya, Pandu menyampaikan bahwa Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan bersedia untuk menerapkan SNI ISO 37001:2016 sebagai model di Jakarta. (ald-Humas).

Tingkatkan Kompetensi Penyuluh Antikorupsi, KPK Gelar Workshop SNI ISO/IEC 17024:2012



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan SNI ISO/IEC 17024:2012 – Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Person pada tanggal 12 s.d. 13 Juni 2017 di Hotel Morissey, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan oleh ACLC (*Anti Corruption Learning Center*) Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat - KPK bekerjasama dengan Pusat Sistem Penerapan Standar Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Pelatihan digelar untuk mendukung upaya-upaya pencegahan korupsi yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam berbagai bentuk kegiatan. KPK merasa perlu menyediakan panduan pembelajaran, dan melatih agen-agen perubahan dari berbagai elemen bangsa sebagai penyuluh antikorupsi dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran antikorupsi secara mandiri yang dilakukan oleh masyarakat.

Untuk memastikan para Penyuluh Antikorupsi memiliki kompetensi dalam melakukan penyuluhan secara efektif, KPK menganggap, ke depannya perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Person bidang Penyuluhan Antikorupsi. Dalam rangka pembentukan LSP Penyuluhan Antikorupsi tersebut, sebanyak 20 orang calon pengelola LSP Penyuluh Antikorupsi diberikan Pelatihan SNI ISO/IEC 17024:2012 dengan harapan kompetensi personal pengelola LSP meningkat, sehingga dapat memastikan bahwa kegiatan sertifikasi dilaksanakan dengan benar dan tidak memihak.

Kepala Bidang Akreditasi Lingkungan - BSN Zul Amri mengisi sesi hari pertama dengan paparan mengenai standarisasi dan penilaian kesesuaian secara umum. Kemudian dilanjutkan pembahasan klausul-klausul persyaratan umum, persyaratan struktural, persyaratan sumber daya, hingga skema sertifikasi yang terdapat dalam SNI ISO/IEC 17024:2012. Hari kedua, Kepala Bidang Akreditasi Sistem Manajemen – BSN, Triningsih menyelesaikan pelatihan dengan paparan tentang persyaratan proses sertifikasi dan persyaratan sistem manajemen.

KPK berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi efektifitas penyuluhan antikorupsi sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi menuju Indonesia yang lebih bersih dan jujur. (Utm)